



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR NARKOBA
(BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR : 152/PID.SUS/2024/PN SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

SURYO WISNU MARTOPO

201003742018329

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR NARKOBA
(BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NOMOR :152/PID.SUS/2024/PN
SEMARANG)**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji dan memenuhi
persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum
Program Sarjana**

HALAMAN PENGESAHAN

Disusun oleh :

Suryo Wisnu Martopo
201003742018329

Mengesahkan,
Tim Penguji,
Penguji I

Sunarto, S.H., M.Hum.
NIDN: 0614046101

Penguji II

Mahmuda Pancawisma F., S.H., M.Hum.
NIDN : 0614026601

Penguji III

DR. Purwanto, S.H., M.Si.
NIDN: 0603046201

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. A. B. Indiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301



SEMARANG

2024

ABSTRAK

Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah global yang serius selama beberapa dekade terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memerangi kejahatan ini, termasuk menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi para pelakunya. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai sanksi kejahatan tindak pidana pengedar narkoba di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, serta literature dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pengedar narkoba di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara, pidana denda, dan bahkan hukuman mati. Besaran sanksi bergantung pada jenis, jumlah, dan peran pelaku dalam jaringan narkoba. Meskipun sanksi hukum yang dijatuhkan cukup berat, namun masih ditemukan banyak kasus peredaran narkoba. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif masih diperlukan, termasuk melibatkan peran serta masyarakat. Selain itu, upaya pencegahan melalui program rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat juga perlu mendapat perhatian yang serius.

Kata Kunci: Narkoba, Pengedar, Sanksi Hukum, Penegakan Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:152/Pid.Sus/2024/PN SEMARANG.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	1
C. PEMBATASAN MASALAH	2
D. TUJUAN PENELITIAN	2
E. MANFAAT PENELITIAN	2
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	4
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN	14
BAB III	26
METODOLOGI PENELITIAN	26
A. TIPE PENELITIAN	26

B. SPESIFIKASI PENELITIAN	26
C. SUMBER DATA	26
D. METODE PENGUMPULAN DATA	27
E. METODE PENYAJIAN DATA	27
F. METODE ANALISA DATA	28
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	29
A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA PENGEDAR NARKOBA	29
B. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PUTUSAN	57
BAB V	59
PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	61